

ABSTRACT

This study aims to analyze the results of calculations of the financial ratio of Local Government Budget (APBD) the City Government of Bekasi in Fiscal Year 2011-2015, based on financial independence analysis: Regional Financial Independence Ratio, The degree of fiscal decentralization Ratio, Effectiveness Ratio, Efficiency Ratio, Analysis of Share and Growth of Local Own-Source Revenue (PAD), Maps of local financial capacity, and Index of financial ability and public service indicator: Analysis of Revenue Variance, Analysis of Shopping Variance, Harmonization Ratio, Expenditure Growth Ratio, and Surplus / Deficit and Regional Financing Analysis. The data used in this study is secondary data in the form of Local Government Budget Realization Report of Budget Year 2011-2015 which has been audited and published by the City Government of Bekasi. The results of this study conclude that: (1) Bekasi Municipality Government in Fiscal Year 2011-2015, the degree of independence and the ratio of fiscal decentralization degree has a pattern of consultative relationships and is considered quite capable of implementing regional autonomy. The implementation of APBD is very effective and efficient. The contribution of PAD to total regional revenue as a whole has increased, but the growth (PAD) as a whole has decreased. The Municipal Government of Bekasi has a high financial capacity (2) based on the Public Service Indicator, the Municipal Government of Bekasi uses more of its budget for indirect expenditure than for direct public services / expenditure. The Over Time Budget Calculation (SiLPA) during the 2011-2015 Budget Year tended to decrease.

Keywords : The financial ratio of Local Government Budget (APBD) the City Government of Bekasi, Financial Independence Analysis, the Public Service Indicator.

MERCU BUANA

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hasil perhitungan dari rasio keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2011-2015, berdasarkan analisis kemandirian keuangan: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Analisis *Share* dan *Growth* Pendapatan Asli Daerah (PAD), Peta Kemampuan Keuangan Daerah, dan Indeks Kemampuan Keuangan dan indikator layanan publik: Analisis Varians Pendapatan, Analisis Varians Belanja, Rasio Keserasian Belanja, Rasio Pertumbuhan Belanja, dan Analisis Surplus/Defisit dan Pembiayaan Daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011-2015 yang sudah diaudit dan dipublikasikan oleh Pemerintah Kota Bekasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) Pemerintah Kota Bekasi pada Tahun Anggaran 2011-2015, tingkat kemandirian dan rasio derajat desentralisasi fiskal mempunyai pola hubungan konsultatif dan dinilai cukup mampu melaksanakan otonomi daerah. Penyelenggaraan APBD sangat efektif dan efisien. Kontribusi (*share*) PAD terhadap total pendapatan daerah secara keseluruhan mengalami peningkatan, namun pertumbuhan (*growth*) PAD secara keseluruhan mengalami penurunan. Pemerintah Kota Bekasi memiliki kemampuan keuangan yang tinggi (2) berdasarkan Indikator Layanan Publik, Pemerintah Kota Bekasi lebih banyak menggunakan anggarannya untuk kegiatan belanja tidak langsung dibandingkan untuk belanja pelayanan publik/belanja langsung. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) selama Tahun Anggaran 2011-2015 cenderung mengalami penurunan.

Kata kunci: Rasio keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Bekasi, Analisis Kemandirian Keuangan, Indikator Pelayanan Publik.

MERCU BUANA